

BAB III

INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT

I. KELEMBAGAAN

I.1 Latar Belakang

Institute for Research and Empowerment (IRE) adalah merupakan sebuah lembaga independent, nonpartisan dan non profit yang berbasis pada komunitas akademik di Yogyakarta. Fokus berbagai kegiatan yang dilakukan oleh IRE adalah pengembangan *good government* dan demokrasi melalui penguatan gagasan, sikap kritis, serta tindakan taktis element masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan negara.

Aktivitas IRE dimulai sekitar awal tahun 1994 IRE yang merupakan sekelompok aktivis kelompok studi yang membicarakan secara kritis masalah-masalah sosial politik melalui diskusi rutin. Menurut **Bambang Hudhayana** Direktur Eksekutif IRE bahwa :

IRE merupakan sebuah lembaga yang lebih banyak bergerak pada pengembangan wacana kritis artinya kita mencoba menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif mengenai berbagai macam pendekatan pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah atau negara (Wawancara, 4 Januari 2002).

IRE secara resmi berdiri di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 1994, yang di prakarsai oleh beberapa intelektual muda seperti : Dr.Heru Nugroho, Drs A.Aryo Salugo, Drs Bambang Hendrata, dan Suharko, S.sos. MSi. Lembaga yang berdiri

dengan akta notaris pada kantor RM. Soerjanto dan yang kemudian di sahkan oleh pengadilan Negri Sleman Yogyakarta (**Brosur IRE 2000 ; 2**).

Pendirian IRE merupakan sebuah respon terhadap semakin hilangnya otonomi dan daya kritis yang dimiliki oleh masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk konstruksi sosial politik yang represif disekitarnya. Masyarakat menjadi tidak berdaya (powerless) ketika harus berhadapan dengan struktur-struktur sosial politik terutama alat-alat negara. Dengan alasan inilah **IRE** akhirnya di desain dan bertujuan untuk mengembangkan daya kritis masyarakat terhadap berbagai bentuk konstruksi sosial sekaligus memberikan wahana untuk merealisasikan potensi daya kreasi masyarakat secara optimal.

Ketidakberdayaan masyarakat lokal dikarenakan adanya kontrol dan dominasi melalui sarana-sarana represif negara yang berada di tangan birokrasi dan militer. Negara lewat media pasar, melakukan monopoli dan eksploitasi yang menimbulkan masyarakat dalam posisi marjinal. Negara lewat media konteks sosial menampilkan bantitisme dan manipulasi sektarisme yang justru menimbulkan *uncivility* dalam masyarakat. Meskipun pada akhirnya negara tampil dominan dan hegemonik, akan tetapi negara dikelola secara tidak transparan dan tidak bertanggung jawab, bahkan digerogeti oleh praktek-praktek perampasan dan korupsi yang merajalela. Dalam konteks ini yang terjadi adalah negara yang lembek, yakni negara yang miskin kapasitas dalam mengawal transformasi ekonomi, redistribusi sosial dan mengelola konflik antar aktor sosial dalam masyarakat (**Profil IRE 2001 ; 1**).

Disisi lain masyarakat dalam posisi marginal karena dampak imprealisme rezim global melalui media pasar. Rezim global melancarkan homogenisasi dan regimentasi budaya melalui media sosio kultural yang menyebabkan alienasi dan isolasi masyarakat. Dalam konteks sosiokultural, dimana masyarakat hidup sehari-hari, juga terjadi diskriminasi melalui instrumen agama, etnis, gender, umur, ras, dan sebagainya, sehingga menimbulkan *uncivility*.

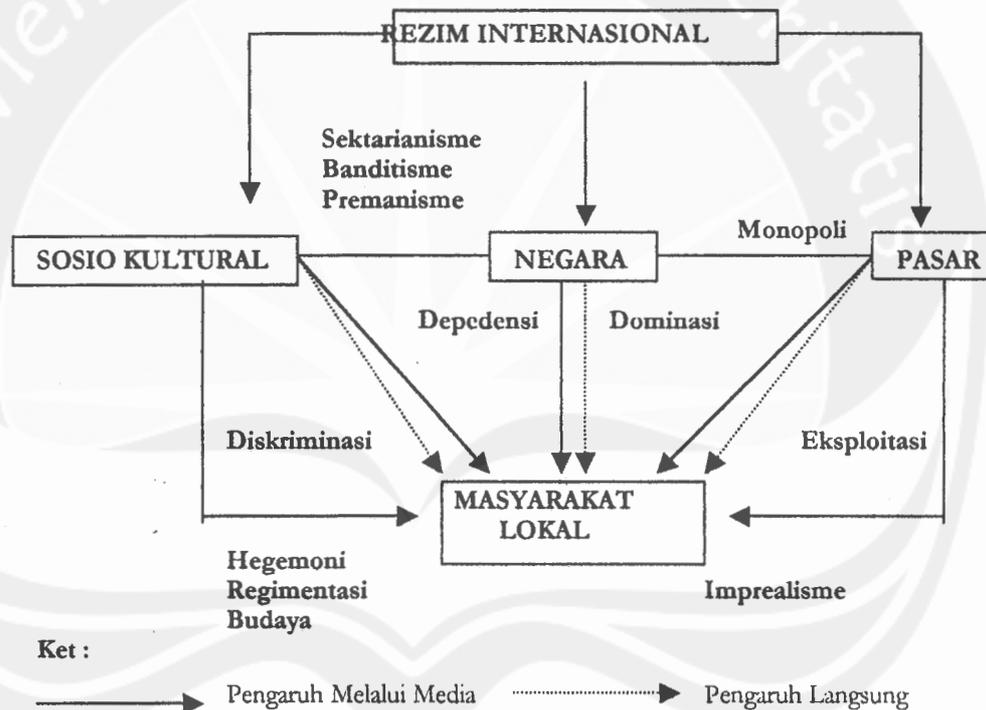
Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melakukan penindasan dari berbagai sektor seperti rezim global, negara, pasar, dan konteks sosial kultural terhadap masyarakat berlangsung secara sistematik, yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat dan kematian potensi otonomi serta daya kreasi masyarakat. Ketika Orde Baru sudah bangkrut bersamaan dengan runtuhnya Soeharto, dan pada saat itu demokrasi sudah dimulai, masyarakat memang sudah memperoleh satu harapan tetapi harus berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Restriksi negara mulai dari nengendor, tetapi euforia di era transisi justru diikuti dengan merebaknya kekerasan horizontal di berbagai daerah atau munculnya "tirani mayoritas" yang berbasis pada rezim agama, etnis, ras dan sebagainya. Di tempat lain, masyarakat lokal juga belum bisa terlepas dari tekanan rezim internasional yang melewati media pasar dan konteks sosio kultural.

Ketidakberdayaan masyarakat lokal itulah yang sampai saat ini masih tetap menjadi "justifikasi sosial" bagi masyarakat itu sendiri. Bagi IRE agar supaya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat lokal yang hadir sebagai sebuah organisasi nirbala yang non profit dan nonpartisan, IRE tampil dengan berbagai upaya-upaya

pemberdayaan untuk memberikan sumbangsih demi terwujudnya kemandirian dan *democratic civility* bagi masyarakat lokal⁶. (Brosur IRE 2000; 3).

Berikut ini akan dengan jelas digambarkan bagan kajian straeGIS dari ketidak berdayaan masyarakat lokal :

Gambar I :
Bagan Kajian Strategis Ketidakberdayaan
Masyarakat Lokal



(Sumber ; Brosur Institute For Research and Empowermet)

⁶ Dalam Pengertian disini masyarakat lokal diartikan sebagai komunitas masyarakat yang berada di desa dan kecamatan.

I.2 Nilai dan Mandat Organisasi

Institute for Research and Empowerment (IRE) dengan bekal perpektif kritis mempunyai mandat pemberdayaan untuk mengembangkan sejumlah nilai yang *inherent* dalam demokrasi seperti :

- a. Kemajemukan
- b. Otonomi
- c. Kemandirian
- d. Kesetaraan
- e. Persamaan
- f. *Civility*
- g. Keterbukaan
- h. Antikekerasan
- i. Antidominasi
- j. Antidiskriminasi (Profil IRE 2001; 1)

Oleh karena itu IRE menyatakan “perang” terhadap wacana dan praktik-praktik aktor-aktor yang anti terhadap nilai-nilai demokrasi. Menurut **Bambang Hidayana** :

Konsep sederhana yang dibangun adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang kuat, masyarakat yang kuat itu wujudnya dalam demokrasi, Pembangunan ekonomi tanpa demokrasi justru membuat masyarakat semakin lemah dan tidak sejahtera (Wawancara 4 Januari 2002).

I.3 Visi dan Misi Institute for Research and Empowerment

Layaknya organisasi-organisasi lain IRE pun memiliki Visi dan Misi yang di gunakan sebagai landasan berpijak dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal guna menegakkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu Visi dari IRE adalah “ terciptanya masyarakat emansipatoris dan merdeka, dari segala bentuk diskriminasi dan represif guna meningkatkan daya kritis yang dimiliki oleh masyarakat”.⁷

Sesuai dengan Mandat serta Visi yang telah diberikan oleh organisasi maka misi yang dimiliki oleh IRE adalah :

1. Mengembangkan daya refleksif dan daya kritis masyarakat atas kontruksi sosial-politik dalam konteks relasi antar rezim global, negara, pasar, dan sosio kultural.
2. Memberi wahana untuk merealisasikan potensi dan daya kreasi masyarakat secara optimal.
3. Mengembangkan modal sosial (*sosial capital*) masyarakat yang disandarkan pada prinsip pluralisme.
4. Memperkuat institusi lokal sebagai basis partisipasi masyarakat lokal dalam tata pemerintahan lokal (*lokal goverment*).
5. Memperkuat transparansi dan akubinitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong kapasitas negara dalam mengawal transformasi ekonomi redistribusi sosial dan mengelola konflik antar aktor sosial dalam masyarakat (**Profil IRE 2001; 1**).

⁷ Sebagai contoh ketika IRE mengembangkan kesadaran Kritis masyarakat misalnya ketika IRE berusaha untuk mengajak masyarakat untuk berpikir dari kesadaran semu menuju pada kesadaran kritis, jadi masyarakat diajak berpikir menegani suatu proyek. Mislanya ketika pada tahun 1997 Indonesia dilandah krisis ekonomi yang berkepanjangan namun IRE tidak konsen pada permasalahan pemulihan ekonomi tapi mencoba untuk mengantarkan masyarakat makin kritis bahwa masalah ekonomi itu rusak karena fondasi negara ini dibangun diatas utang..... (Wawancara dengan Bambang Yudharyana 4 Januari ; 2002).

I.4 Kegiatan Utama

Untuk mencapai visi dan misi mulia di atas, IRE mendesain empat aktivitas utama :

- a. **Penelitian aksi**, yang bersifat kritis dan partisipatif terhadap berbagai fenomena ketidak berdayaan masyarakat terutama untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat. Hasil-hasil penelitian senantiasa dirumuskan sebagai modal untuk keperluan program aksi dan perubahan dalam masyarakat.
- b. **Pendidikan dan pelatihan**, merupakan wahana untuk menghimpun dan mengdiseminasikan pemikiran kritis dan wacana alternatif di berbagai komunitas aktor yang berasal negara, masyarakat politik, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi, yang acap kali tidak mampu difasilitasi oleh institusi yang telah ada. Pendidikan dan pelatihan juga sebagai media asistensi untuk peningkatan kapasitas aktor-aktor strategis seperti birokrat lokal, politisi, kaum profesional, peneliti, aktivitas sosial, mahasiswa dan lain-lain.
- c. **Publikasi**, yang merupakan sarana artikulasi dan sosialisai ide-ide kritis yang ditimba dari berbagai pemikiran dan aktivitas kelembagaan. Bentuk publikasi ini berupa buletin serta buku-buku.
- d. **Advokasi**, yaitu gerakan bersama (melalui analisis kebijakan, dialog dan *public hearing*) untuk melakukan perubahan kebijakan publik di ranah negara dan rekayasa budaya dalam arena masyarakat sipil. (**Profil IRE 2001 ; 2**).

I.5 Kelompok Sasaran

Guna untuk menjalankan semua kegiatan yang telah tercantung dalam program utama yang ingin dikembangkan oleh IRE maka sudah barang tentu IRE mempunyai atau target kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan menjadi binaanya. Kelompok utama atau sasaran utama IRE adalah : aktor-aktor strategis dalam komunitas masyarakat adat. Dalam komunitas lokal tersebut,

paling tidak terdapat element yang salaing berinteraksi lewat dialog diatara mereka, sebab menurut **Bambang Hidayana**

IRE mengembangkan berbagai macam diskusi-diskusi kelompok karena IRE melihat bahwa masyarakat ORBA itu kan anti dialog, kemudian IRE menawarkan dialog-dialog di forum-forum di tingkat RT, ibu-ibu dll “ (Wawancara; 4 Januari 2002).

dalam hal ini IRE hanya bertindak sebagai fasilitator yang membangun hubungan sinergis diantara mereka, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat lokal desa, ditambahkan lagi oleh **Bambang Hidayana**

Bahwa **IRE** memiliki program yang dinamakan dengan program Dicause, yang mana program ini mencoba untuk mengajak masyarakat membiasakan dialog lewat diskusi-diskusi kelompok guna memecahkan masalah-masalah internal dalam komunitas mereka, dalam wilayah pergaulan mereka sehingga untuk mewujudkan cita-cita masyarakat sipil dapat terwujud. (Wawancara 4 Januari 2002).

IRE dalam melakukan pemberdayaan dengan komunitas pendampingan dalam hal ini komunitas masyarakat yang berada di desa dan kecamatan, yang mana komunitas itu merupakan tempat mengembangkan forum warga sebagai sebuah modal sosial untuk mengembangkan *good government* dan demokrasi. IRE terus melakukan pemantauan terhadap kelompok dampingan tersebut dan untuk kedepan IRE akan memanfaatkan sejumlah relawan untuk memperkuat pendampingan terhadap komunitas lokal dampingan. (Arie Dwipana; Flama VI; Maret 2001; 24).

I.6 Strategi Organisasi

Dalam melakukan penelitian, pendidikan serta pemberdayaan terhadap masyarakat lokal, IRE mengambil beberapa strategi yang digunakan sebagai sebuah acuan dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Strategi-strategi tersebut meliputi :

- i. **Berpihak** ; artinya kajian-kajian ilmiah yang digelar tidak semata-mata bersandar pada prinsip objektivitas dan bebas nilai (*value-free*), melainkan bersandar pada prinsip intersubjektivitas dan berpihak untuk kepentingan dan perubahan masyarakat lokal.
- ii. **Dekonstruksi**, sebagai upaya membangun wacana-wacana tandingan atas hegemonik yang bersumber dari rezim global, negara, masyarakat dan konteks sosio-kultural.
- iii. **Diseminasi** yakni merupakan wacana-wacana tandingan yang dibangun dengan dekonstruksi disebarluaskan ke publik melalui opini, publikasi, seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya.
- iv. **Fasilitasi** yakni memberi ruang dialog antar segmen dan sekaligus mendorong pembentukan institusi-institusi lokal yang demokratis.
- v. **Partisipasi - intervensi**, yakni proses pendidikan politik yang menggunakan kombinasi antara partisipasi kelompok sasaran dan intervensi intelektual. Partisipasi dimaksudkan sebagai upaya panggilan kearifan lokal. Sedangkan intervensi intelektual merupakan bentuk transfer pengetahuan serta kebijakan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.
- vi. **Asistensi** yakni bentuk transfer pengetahuan dan penguatan ketrampilan melalui media penelitian untuk meningkatkan kapasitas para pengelola *local governance*.
- vii. **Advokasi** yakni kampanye bersama untuk melakukan perubahan kebijakan di ranah negara dan rekayasa budaya di ranah sosial kultural. (Profil IRE 2001; 3).

Dengan demikian untuk mewujudkan visi, misi, serta strategi yang dimiliki oleh IRE, tentunya lembaga ini mempunyai prinsip yang selalu menjadi patokan dalam menjalankan berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah : kebebasan, persaudaraan, kesetaraan, keterbukaan, kemitraan, toleransi, dan akuntabilitas. Menurut Arie Sujito :

Strategi yang dikembangkan oleh IRE adalah memfasilitasi mulai dari pengembangan wacana sampai pada kita melakukan intervensi untuk perubahan kebijakan, sampai kita memberikan usulan-usulan untuk perubahan kebijakan (Wawancara; 3 Desember 2001).

I.7 Program Utama IRE

Sejak awal berdirinya IRE didesain sebagai sebuah lembaga riset dan advokasi yang mempromosikan *good government*, demokratisasi, desentralisasi (otonomi daerah/desa) dan pemberdayaan masyarakat sipil. Isu strategis itu merupakan satu kesatuan, yang pada intinya hendak "membawa Negara dekat ke masyarakat". Dengan kata lain Menurut Ari Dwipayana :

Program Utama IRE kedepan adalah melakukan reformasi tata pemerintahan dan penguatan demokrasi. Agenda aksi yang dipanungi oleh program itu mencakup : pengembangan semangat pluralisme, demokratisasi masyarakat lokal, desentralisasi dan otonomi daerah, penataan kelembagaan daerah, pembaharuan kelembagaan publik, pengembangan manajemen konflik berbasis masyarakat, pemberdayaan parlemen lokal penguatan partisipasi dan kontrol masyarakat, pengembangan media alternatif bagi masyarakat. (Flama VI; Maret 2001; 24).

Gagasan itu paling tidak mengedepankan beberapa usulan sebagai bentuk respon terhadap permasalahan demokratisasi yang terjadi di Indonesia :

1. Meningkatkan kapasitas negara dalam masyarakat, baik kapasitas ekstratif, distributif, dan fasilitatif.
2. Mengembangkan pengelolaan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparantif, akuntabilitas, dan responsivitas.
3. Mengembangkan desentralisasi atau devaluasi politik dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal atau dari negara ke masyarakat.
4. Pemberdayaan untuk mencapai masyarakat sipil yang dinamis, kokoh dan mandiri.
5. Mengembangkan semangat pluralitas yang menjunjung tinggi toleransi antar SARA dan penghargaan terhadap minoritas.

6. Pengembangan terhadap *manual trust* antar element masyarakat dan antar masyarakat dengan perangkat Negara.
7. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sampai pada kontrol terhadap penyelenggaraan Negara.

Secara kelembagaan keempat isu strategis tersebut diwadahi menjadi dua program utama : 1) *Government* dan Otonomi dan 2) Demokrasi dan *Civil Society* yang mencakup berbagai program utama seperti yang tersaji berikut ini :

Tabel 3 :
Program Utama IRE

Program I : Government dan Otonomi	Program II : Demokrasi dan <i>Civil Society</i>
1. Good Government	1. Pengembangan Institusi Lokal dan masyarakat adat.
2. Reformasi Birokrasi	2. Pengembangan Demokrasi Komunitarian.
3. Reformasi dan pelayanan publik	3. Partisipasi Masyarakat.
4. Demiliterisme dan Demiliterisasi	4. Resolusi Konflik
5. Kontrol terhadap militer	5. Pendidikan Pemilih dan Kewarganegaraan
6. Reformasi Polisi	6. Pengembangan Modal Sosial
7. Anti Korupsi	7. Pengembangan Media Rakyat
8. Penguatan kelembagaan Ekonomi	8. Hubungan SARA
9. Desentralisasi	9. Pemberdayaan Parlemen Lokal
10. Hubungan kelembagaan desa - kabupaten	10. Pemberdayaan Partai Politik
11. HAM + Rule of Law	11. Pemantauan Pemilu

Sumber : Profil IRE 2001 ; 7

I.8 Susunan Kelembagaan

Dibawah nauangan Yayasan IRE Flama, IRE terbagai menjadi Dewan Penaschat, Dewan Eksekutif, Divisi-divisi, dan Program. Dengan struktur sebagai berikut :

Dewan Pengurus IRE

Ketua Dewan Pengurus

Dr Heru Nugroho

Anggota

Bambang Hendrata

Sujarwo

Suharko

Dewan Penasehat

Susetiawan

Pratikno

Cornelis Lay

Lambang Trijono

Dewan Eksekutif

Direktur Eksekutif

Bambang Hudayono

Deputi Direktur

Sutoro Eko

Program Governance dan Masyarakat Sipil :

Arie sujito

AA GN Ari Dwipayana

Eric Hiariej

Sukasmanto

Novia Cici Anggraeni

Bramantyo

Program Demokrasi dan Masyarakat Sipil :

A.Gaffar karim

Poppy S Winanty

Krisna Dharma

Budi Irawanto

Mefi Hermawanti

Addur Rozaqi

Joko purnomo

Program Advokasi dan Jaringan

Krisdyatmiko

Dewi Utari

Muhamad Budi Susila

Sunaji

Anang Sabtino

Partono

Hasti Rinandari

Program Publikasi dan Informasi

Titok Harianto

Heri Purwanto

Keuangan

S. Yulianto
Anita Indriani

Manager Kantor

Andi Wibawa

Sekretaris

Rino Hanisasti

Pembantu Umum

Suparmo

II. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT

II.1 Model Pendidikan Politik Institute For Research and Emporwerment

Model Pendidikan Politik yang dikembangkan oleh IRE pada intinya mencoba untuk membantu masyarakat lokal atau masyarakat tingkat desa dan kecamatan untuk menguatkan kapasitas mereka atau *kapasitas bulding*, setelah terbentuk kapasitas masyarakat kemudian IRE memluas ruang publik di tingkat komunitas. Menurut Suturo Eko Deputy Direktur IRE ruang publik disini diartikan untuk lebih mengembangkan dialog-dialog diantara masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. (Wawancara; 18 maret 2002)

Seperti yang dicontohkan oleh Suturo Eko bahwa :

IRE ingin mengembangkan tentang pemahaman demokratisasi ditingkat masyarakat, IRE tidak langsung datang ke masyarakat dan membicarakan permasalahan demokratisasi yang ada dalam buku, tapi bagaimana demokrasi dibawah kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat seperti pengolahan sampah, lalu lintas, pengaturan air dsbnya. Dari persoalan-persoalan ini kemudian dibahas dan didiskusikan melalui faham demokratisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, namun hal ini bukan dilakukan

seperti kegiatan-kegiatan ceramah maupun penataran P4 yang dilakukan oleh ORBA. (Wawancara 18 Maret 2002)

Ditambahkan lagi oleh **Bambang Hidayana** bahwa

Metode pendekatan masyarakat itu bermacam-macam namun yang terpenting adalah bagaimana mengajak orang untuk berpikir kritis, jadi dia diajak berpikir tentang misalnya proyek irigasi itu yang untung siapa mereka diajak berpikir mengenai hal tersebut” (Wawancara; 4 Januari 2002).

Menurut **Sutoro Eko**, dari pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh IRE dilapangan, IRE berusaha untuk memperbaiki dan merefleksikan guna melakukan perubahan-perubahan baik dari model, pendekatan dan sasaran. Seperti program yang pernah dilakukan oleh IRE dengan istilah *young community leader* dengan sasaran para pemimpin karang taruna, aktivis ormas, ketua remaja masjid, dsbnya yang mana IRE harapkan *pertama*, mereka dapat melakukan perubahan sikap dari yang konservatif ke sikap yang terbuka dan demokratis. *kedua*, memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai persoalan kemasyarakatan, tentang persoalan negara. *Ketiga* dapat mensosialisasikan apa yang mereka peroleh kepada anggota komunitas mereka ditingkat lokal. (Wawancara 18 Maret 2002)

Namun setelah melakukan evaluasi ternyata transformasi dari *community leader* ke komunitasnya tidak berjalan dengan berbagai alasan pragmatis saja seperti dana, waktu dan sebagainya. Baru setelah itu IRE melakukan perubahan orientasi yaitu dengan masuk kedesa-desa untuk mendengar aspirasi para petani, ibu-ibu pemuda kemudian IRE mencoba untuk memfasilitasinya dalam dialog-dialog untuk

mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, namun hal ini masih bersifat formal.

Dengan di lakukan pendampingan langsung kedesa-desa maka akan timbul sebuah pembelajaran sosial diantara masyarakat. Pembelajaran sosial itu pendekatan dan modelnya adalah suatu pendidikan yang 'partisipatif'. Bagi IRE seperti yang diungkapkan oleh **Sutoro Eko** bahwa

Patisipatif adalah agenda atau issue yang dibicarakan adalah persoalan-persoalan yang dihadapi sehari-hari karena dengan cara ini masyarakat akan merasa memiliki, maka hal itu akan berbeda dengan ketika kita kesana dan membawa konsep demokratisasi yang besar (**Wawancara 18 Maret 2002**).

Bagi IRE pemberdayaan pendidikan politik dan demokratisasi ada beberapa hal :

1. Menyiapkan institusi, jadi masyarakat diorganisir untuk dan dibentuk organisasi/institusi.
2. Setelah mereka diorganisir kemudian masyarakat diajak untuk melakukan analisis sosial. Analisis sosial berarti mengidentifikasi persoalan-persoalan sosial yang mereka hadapi dan potensi yang dapat dikembangkan dalam organisasi internal tersebut.
3. Menyiapkan aturan main diantara organisasi itu. (*Sutoro Eko ; wawancara; 18-03-2002*).

Dengan demikian menurut **Sutoro Eko** demokrasi

Adalah partisipasi yang kalau diartikan ditingkat lokal ada keterlibatan setiap orang dalam proses kegiatan itu yang kedua harus ada aturan main yang dihasilkan oleh kontak sosial diantara mereka tanpa ada aturan harus muluk-muluk. (**Wawancara 18 Maret 2002**).

Dengan demikian model pendidikan politik yang dikembangkan oleh IRE adalah mencoba masuk dengan melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat dengan mengembangkan dialog yang partisipatif dan belajar bersama dengan masyarakat mengenai masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan dialog yang baik mengenai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat maka dengan sendiri proses demokratisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan hidup bersama dengan masyarakat maka bagi IRE akan lebih mudah untuk mengenal serta berinteraksi untuk mencari serta memecahkan masalah yang mereka hadapi.

II.2 Rangkaian Kegiatan Pendidikan Politik IRE

Mulai dari tahun 1994 semenjak berdirinya IRE yang awalnya hanya kelompok studi dan kegiatannya hanya sebatas diskusi, namun pada tahun 1997 IRE tidak lagi memainkan peran sebatas kelompok studi namun lebih berkembang menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkiprah pada perkembangan demokratisasi di masyarakat lokal. Didukung oleh aktivis yang berasal dari akademisi dengan berusaha mengaktualisasikan ilmu dari dalam kampus dengan kehidupan *real* di masyarakat IRE berusaha untuk mengembangkan komunitas dampingan, maka mulai tahun 1997 IRE melakukan berbagai bentuk kegiatan pendidikan politik seperti : (Flama;Maret 2001;24).

1. Tahun 1997, IRE menggelar program "*pengembangan pluralisme wacana demokratisasi di kalangan kaum muda* " , yang di dukung oleh **Pact** dan

USAID. Program ini dicapai dengan berbagai kegiatan seperti penelitian kecil tentang wacana demokratisasi yang berkembang di kaum muda kemudian dilanjutkan di dengan lokakarya serta publikasi Flamma⁸.

2. Antara bulan October 1998 hingga October 1999 IRE melakukan program program “ Pengembangan Jaringan Pengaman Politik “ yang didukung oleh **PACT Indonesia** dan **USAID**. Program ini ingin mencermati pembelokan wacana reformasi yang berkembang di masyarakat. Program ini dicapai melalui penelitian, seminar, lokakarya.
3. Menjelang Pemilu 1999 IRE menggelar Program pendidikan pemilih yang didukung oleh **ACILS Indonesia**. Semenjak program ini IRE mulai masuk ke desa-desa di wilayah DIY.
4. September 1999 hingga Oktober 2000 IRE menggelar program Pendidikan Kewarganegaraan di bawah dukungan **ACILS Indonesia**. Program ini digelar untuk melakukan diskusi seputar masalah kewarganegaraan dan demokrasi di sejumlah desa yang selama ini menjadi mitra IRE.
5. Antara Desember 1999 hingga juni 2000, IRE menggelar program “Demiliterisasi Masyarakat Sipil” dengan didukung oleh **PACT Indonesia**. Wacana ini dimaksudkan untuk penyebaran wacana militerisasi sebagai kendala pengembangan demokrasi dan sekaligus membuka

⁸ Flama Merupakan buletin yang dihasilkan oleh IRE untuk mempublikasikan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama IRE melakukan program-program pendidikan politik.

kesadaran bagi masyarakat bahwa praktik-praktik militerisme yang berkembang di Indonesia.

6. Program ini kemudian dilanjutkan dengan membangun program “membangun kontrol masyarakat terhadap militer di kecamatan yang didukung oleh **OTI/USAID** mulai dari Desember 2000 hingga Juni 2001. program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi kontrol yang dimiliki oleh masyarakat terhadap lembaga MUSPIKA (Camat, Danramil, dan Kapolsek), dan program ini juga menjadi titik awal bagi IRE untuk mengembangkan forum warga di tingkat kecamatan.
7. Mulai Januari hingga desember 2001 IRE yang bekerja sama dengan Pact Indonesia menggelar program “Pengembangan Demokrasi Melalui Diskusi komunitas yang berkelanjutan”. Program ini berusaha menumbuhkan sikap dan budaya demokratis masyarakat dan budaya demokratis masyarakat dalam mengelola kehidupan desanya termasuk mendorong penyelesaian masalah lokal secara demokratis.
8. Sejak awal 2001 hingga desember 2002 IRE menggelar program “pengembangan *good government* dalam konteks otonomi desa yang bekerja sama dengan **Ford Foundation**. Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh IRE lewat program ini :
 - a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan bertanggung jawab serta responsif.
 - b. Memperkuat badan perwakilan desa sebagai sebuah institusi demokrasi di perwakilan di tingkat desa, terutama peran mereka dalam melakukan kontrol eksekutif.

Model Pendidikan Politik Lembaga Swadaya Masyarakat

- c. Mendorong terciptanya pasar lokal yang kompetitif yang memungkinkan perluasan akses bagi masyarakat bawah.
- d. Mendorong element-element masyarakat sipil yang lebih dinamis dan partisipatif.

Dengan pengalaman ini IRE sebagai sebuah LSM sampai sekarang telah memiliki komunitas (desa atau kecamatan) dampingan, tempat untuk mengembangkan forum warga sebagai sebuah wadah sosial untuk mengembangkan good government dan demokrasi.

II. 3 Program Wacana Demiliterisasi dalam Masyarakat Lokal

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat lebih jauh melihat bagaimana model pendidikan politik yang dikembangkan oleh IRE, untuk itu peneliti mencoba untuk membahas program pendidikan politik dengan tema Wacana Demiliterisasi dalam Masyarakat Lokal.

II. 3. a Landasan Pemikiran Kegiatan

Mengapa Proyek Penguatan Wacana Demiliterisasi dalam Masyarakat Lokal “ Perlu di selenggarakan?. Ada dua dasar pemikiran yang melandasi pemikiran ini

1. Hubungan sipil dan militer selama ini dalam kerangka sistim nondemokratis yang menampilkan wajah militerisasi.”
2. Situasi konstektual dan transisional menuju demokrasi di Indonesia saat ini membuka peluang yang lebih besar untuk melakukan demiliterisasi yang mendorong hubungan sipil – militer dalam kerangka demokrasi, baik di level nasional maupun ditingkat lokal. (*Proposal Kegiatan 2000; 7*).

Selain itu menurut **Arie Sujito** Awalnya IRE memilih program ini karena IRE melihat dari beberapa prespektif teoritis menunjukkan

Bahwa ada persoalan penting di Indonesia yaitu persoalan masih kuatnya militerisme dianggap penghalang dari momentum dari sekian banyak perombakan di tata pemerintahan atau struktur sosial maupun budaya persoalan militerisme belum disentuh padahal tiap hari kita melihatnya tapi banyak orang takut untuk membicarakannya, oleh karena itu maka IRE hanya mengambil wacana dulu harus kita gulingkan karena kita melihat praktek-praktek kekerasan terjadi dimana-mana (Wawancara 3 Desember 2001).

Di tambahkalan lagi oleh **Sutoro Eko** bahwa

Ide ini berangkat dari kenyataan bahwa militerisme sangat berada dalam masyarakat pola-pola militerisme dan itu merupakan pola didik jaman orde baru, itu sudah mengakar dan kita susah sekali untuk keluar dari permasalahan tersebut dan kita hanya melempar wacana serta mempublikasikan buku. (Wawancara 18 Maret 2002).

Sebagai sebuah negeri demokrasi baru, Indonesia masih tetap menghadapi kokohnya militer yang sulit dikendalikan. Bahkan sampai saat ini, hubungan sipil dan militer di Indonesia masih tetap mewarisi tradisi militerisasi dari Orde Baru yang tidak kondusif bagi demokratisasi. Menurut **Arie Sujito**

Pada masa ORBA praktek militerisme masih sangat kuat dan tidak ada kesinambungan hubungan sipil dan militer, militer sangat subordinat dalam tatanan politik medeterminasi, mempengaruhi, mengintervensi, akibatnya banyak kebijakan-kebijakan politik banyak dipengaruhi oleh cara-cara militeristik” (Wawancara; 3 Desember 2001).

Pengaruh militerisme begitu kuat membuat dampak yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. **Arie Sujito** melihat dampak-dampak yang terjadi dalam masyarakat seperti

Militerisasi melahirkan otorianisme di dalam struktur birokrasi, Militerisasi juga menciptakan reproduksi kekuatan masyarakat, Militerisasi menciptakan ketergantungan yang begitu tinggi dari masyarakat, Militerisasi juga membuat tentara menjadi tidak profesional karena harus mengurus kayu jati, mengawasi perusahaan, minyak, mengamankan kelompok tertentu yang kemudian terjadi premanisme, masyarakat itu menjadi terhegemoni dari dominasi

militerisme dalam kehidupan sipil hal ini terbukti bahwa masyarakat selalu menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara kekerasan, dan dia akan nyaman kalau ada tentara. (Wawancara; 3 Desember 2001).

Untuk memahami militerisasi dan demiliterisasi, kita bisa melacak makna dasar militer sebagai sebuah kekuatan angkatan bersenjata yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara, yang lazim disebut sebagai dengan “fungsi militer”. Fungsi militer harus dapat dibedakan dengan “fungsi non militer” yang terkait dengan urusan pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, atau urusan-urusan lainnya di luar pertahanan kewan. Dalam studi mengenai hubungan sipil dan militer sering dikenal dengan “militer profesional” dan “militer praetorian”. Militer profesional adalah militer yang hanya menjalankan fungsi pertahanan keamanan, bukan mengurus fungsi nonmiliter. Jika militer ikut mengurus atau bahkan melakukan intervensi ke dalam fungsi nonmiliter, maka itu disebut dengan militer praetorian (**Proceeding Program Maret – Agustus 2000; 2**).

Militerisasi sebenarnya punya keterkaitan dengan orientasi militer profesional dan praetorian di atas. Jika dikaitkan dengan dimensi profesional militer, maka demiliterisasi dipahami sebagai upaya membangun dan memperluas kekuatan angkatan bersenjata untuk mempersiapkan perang dan memperkuat pertahanan – keamanan sebuah negara. Makna militerisasi ini dipahami sebagai bentuk *military build-up*. Pengertian dari *military build-up* adalah pembesaran kekuatan militer sebagai alat pertahanan dan keamanan negara moderent yang bisa di lihat dari indikator-indikator kuantitatif : bertambahnya personel militer anggaran

militer, teknologi persenjataan, ekspor-impor senjata, dsbnya. (Sutoro Eko (ed) 2000 ; 17).

Akan tetapi ada hal yang menarik pada tipe militerisme *build-up* yang mana secara internal militerisasi berdampak positif terhadap militerisasi dan demokrasi karena melahirkan melahirkan militer yang profesional. Menurut Samuel Huntington (Sutoro Eko (ed) 2000 ; 20) militer yang profesional mempunyai tiga ciri utama :

1. Keahlian, sehingga profesi militer kian menjadi spesifik serta perlu pengetahuan dan ketrampilan.
2. Militer profesional mempunyai tanggung jawab sosial yang khusus.
3. Militer profesional memiliki karakter korporasi yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat.

Selain bentuk militerisme *build-up* ada juga tipe militerisme *build-in* yang juga merupakan bagian dari konsep militer dan militerisme. Militerisme *build-in* merupakan isu yang paling sensitif karena militerisasi dan bentuk intervensi serta dominasi militer *praetorian* dalam dunia politik yang melahirkan pengertian militerisasi *build-in*. Militerisasi *build-in* sangatlah berbeda dengan militerisasi *build-up*, yang mana *build-in* mengandung pengertian bahwa militer masuk atau melakukan intervensi kedalam dunia politik yang sebenarnya menjadi unsur kaum sipil. Akibat dari adanya intervensi inilah yang kemudian menimbulkan tumbuh berkembangnya rezim otoritarian atau rezim militer (Sutoro Eko (ed) 2000 ; 18)

Secara ideologis militerisme dan militerisasi pada tipe ini justru tumbuh dalam masyarakat negara yang memiliki militer lemah sebagai kekuatan

HANKAM. Oleh karena lemah maka militer cenderung melakukan indoktrinasi dan mobilisasi massa untuk terlibat dalam kegiatan militer. Militerisasi masyarakat sipil cenderung tumbuh dalam masyarakat majemuk yang berbasis pada sentimen primordial, dan jika sentimen primordial tumbuh sangat kuat maka militerisme akan tumbuh dengan sendirinya dalam kelompok-kelompok sosial.

Militerisasi dalam pengertian ini antara lain bisa dilihat dari tampilnya pemimpin yang berbasis militer, jumlah perwira yang menduduki jabatan politik, keterlibatan para perwira dalam pembentukan kebijakan negara, susunan birokrasi sipil yang serupa dan bahkan sejajar dengan struktur komando militer, penguatan pendekatan represif untuk menangani konflik, dan sebagainya selain itu penyelesaian masalah dengan cara-cara kekerasan, anti dialog, anti pendatang dan sebagainya merupakan bagian dari mengakarnya militerisasi dan militerisme *bulid-in* dalam masyarakat yang menjurus pada praktek-praktek *uncivilized* yang pada akhirnya menimbulkan kematian pluralisme dan demokrasi.

Gambaran mengenai militerisasi dan militerisme dapat dengan jelas digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Tipologi Militerisasi dan Militerisme

ITEM	BUILD – UP	BUILD – IN
Indikator	Bertambahnya personel militer, anggaran militer, teknologi persen	1. Masuknya militer dalam politik. 2. Internalisasi Nilai, idiologi, perilaku, organisasi, wacana militer dalam masyarakat sipil (dengan atau tanpa militer)
Level	Negara atau Elite	Masyarakat dan massa
Bentuk militerisme	Militerisme elite dan struktur kekuasaan	Militerisme masyarakat atau militerisme massa
Level gejala	Sosiologis	Idiologis
Akar sosial	Masyarakat kapitalis-industrial; militer sebagai kekuatan hankam sangat kuat.	Masyarakat semikapitalis, militer sebagai kekuatan hankam lemah, dan dalam masyarakat majemuk yang berbasis pada sentimen primordial (agama, ras, suku)
Strategi	Partisipasi militer	Penguataman mobilisasi massa
Persipan perang	Perang terbatas untuk kepentingan keluar	Perang semesta untuk kepentingan kedalam

Sumber :Sutoro Eko (ed) 2000 ; 20)

Di Indonesia, sejak Orde Baru hingga saat ini, militerisasi *build in* di tanamkan melalui doktrin Dwifungsi ABRI⁹. Militer tidak semata-mata menjadi alat pertahanan keamanan yang profesional tetapi juga sebagai kekuatan politik yang *praetorian*. Dalam kehidupan sehari-hari militerisasi lewat dwi fungsi hadir kedalam dua wajah yang terkait : Dwi Fungsi teritorial dan Dwi Fungsi Struktural. (Harold Crouch 1978 dan 1975 ; Proceeding Program Maret – Agustus 2000; 4).

⁹ Idiologi Dwifungsi ABRI pertama kali diperkenalkan oleh Jendral A.H Nasution dalam pidatonya berjudul “ Jalan Tengah TNI “ pada Tanggal 12 November 1958. Dalam Pidato ini Jendral Nasution mengatakan bahwa perwira TNI harus diberi kesempatan untuk melakukan partisipasinya di dalam pemerintahan atas dasar individual dan memberikan keahlian non militer mereka guna perkembangan bangsa dan negara (Azca Najib ; 1997 ; hal 48). Dengan kata lain Jendral Nasution mengatakan selain memiliki peran keamanan TNI / ABRI juga ikut terlibat dalam proses politik Pemerintahan.

Dwi fungsi Teritorial hadir dalam bentuk struktural birokrasi sipil dan militer dan militer yang hirarkis dan paralel dari Jakarta sampai ke pelosok desa. Hirarki birokrasi sipil mengalir dari Departemen dalam Negeri, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/desa. Contoh yang jelas dapat dilihat pada tingkat Kabupaten yang masih terdapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) yang terdiri dari Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, dan Kepala Pengadilan sebagai otoritas ekstraparlement yang *kohefif* untuk mengendalikan masyarakat. (Proposal kegiatan 2000;8)

Sendangkan *Dwi Fungsi Struktural* hadir dalam bentuk "kekaryaan" TNI / POLRI atau keterlibatan mereka dalam jabatan-jabatan sipil, seperti anggota DPR/MPR, Menteri, Sekjen, Dirjen, Gubernur, Bupati, Anggota DPRD, Camat, dan Kepala Desa/Lurah. Dalam Birokrasi Sipil juga terdapat Dirjen Depdagri, Ditsospol di Propinsi, Kantor Sospol di Tingkat Kabupaten yang bertugas sebagai aparat intelejen sipil dan aparat ideologis untuk keperluan indoktrinasi kepada warga sipil, maupun lembaga regulasi terhadap aktivitas politik dan sipil.

Desain besar militerisasi lewat dwi fungsi merupakan perwujudan pendekatan keamanan ke dalam, yang dimasud sebagai penguasaan sumber daya ekonomi politik untuk kepentingan korporat militer dan sekaligus sebagai perwujudan koersi, represi dan birokrasi politik. Tujuan besarnya adalah untuk pelestarian status quo rezim otoritarian. Dengan dalih persatuan dan kesatuan, integrasi dan stabilitas militer bekerja dengan pendekatan represif untuk menindas elemen-elemen masyarakat sipil. Di zaman Orde baru militer mengklaim dirinya

berhasil menciptakan stabilitas dan integrasi tetapi semuanya itu hanya prestasi semu yang tidak *legitimate* di mata rakyat. Militer selain menciptakan kekuatan rakyat ternyata juga gagal dalam meredam kekerasan, kerusuhan, dalam bahaya disintegrasi. (Proceeding Program; Maret – Agustus 2000; hal 6).

Dalam komunitas masyarakat sipil sendiri sering mengundang tentara jika terjadi konflik antarwarga, antarkelompok, misalnya kehadiran tentara ikut menyelesaikan konflik antar kelompok yang muncul karena kekecewaan terhadap pemilihan lurah.

Pada sisi lain, militer juga merambah ke sektor ekonomi yang biasanya tampil dalam bentuk Premanisme Militer, yang sebenarnya merusak nilai dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut **Aris Mudayat** bahwa :

Perkembangan Premanisme yang melibatkan militer sebenarnya ada kaitan dengan masalah distribusi resources ekonomi. Biasanya, di mana wilayah-wilayah bisnis tidak mampu dijangkau oleh hukum maka yang berfungsi adalah mekanisme kepremanan. Yang menarik premanisme ini ditandai dengan ruang atau wilayah sosial yang sengaja direkonstruksi untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi. (Flama Edisi 9 tahun VI; Maret 2001) .

Premanisme militer tampil dalam wajah kebiasaan militer menjadi “beking” bagi pengusaha dari perusahaan yang legal sampai menjadi beking pada usaha-usaha yang ilegal seperti rumah bordir, bisnis norkoba, bisnis perjudian, penjarahan kayu dan sebagainya.

Premanisme militer adalah perwujudan keyakinan masyarakat bahwa militer adalah kekuatan yang paling unggul sebagai peredam konflik maupun sebagai pelindung dan penjaga keamanan. Orang sering membayar tentara untuk

menyelesaikan masalah atau konflik, yang sebenarnya merusak aturan mainan dan tata krama sosial dalam masyarakat sekaligus tetap memelihara kekerasan dan kejahatan. Kebiasaan warga sipil membayar tentara ini, memperlihatkan bahwa mereka tidak mempunyai mekanisme penyelesaian konflik secara mandiri, dan menempatkan tentara sebagai kelompok yang tidak profesional dan hanya sebagai penjaga keamanan kolektif yang seharusnya bersifat netral di atas semua kepentingan. .(*Proceeding Program, Maret – Agustus 2000, hal 8*).

Gambaran mengenai peran militerisme yang merambah mulai sektor politik / pemerintahan, keamanan dalam masyarakat sipil, dan sektor ekonomi walaupun pada akhirnya masyarakat menerimanya secara wajar akan tetapi hal tersebut menimbulkan implikasi yang kusut dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam wawancara dengan **Arie Sujito** salah seorang staff IRE, beliau mengatakan bahwa :

- Penerimaan masyarakat terhadap peran militer dalam politik/pemerintahan, sebagai akibat dari terhegemoninya masyarakat selama 32 tahun, yang mana masyarakat terbelenggu kesadarannya. Karena bagi Gramsci hegemoni membuat orang tundukan kesadarannya, akibat dari ini maka masyarakat menjadi tidak berdaya. (Wawancara 3 Desember 2001).

Gambaran dari penjelasan diatas dapat digambarkan secara sederhana pada tabel berikut :

Tabel 5
Mata Rantai Militerisasi dalam Hubungan Sipil-Militer

Isu Besar	Bentuk Kongret	Subtansi	Dampak
Politik	Kekaryaan militer dalam jabatan sipil (menteri, gubernur sampai kepala desa) serta intervensi militeristik dalam birokrasi sipil	Penguasaan sumber daya ekonomi-politik kontrol politik militer dominasi militer atas sipil	Lemahnya elemen-elemen sipil, kompetisi tidak terbuka, korban hak-hak sipil dan politik warga negara, kematian demokrasi, pembudayaan kekerasan
Kemasyarakatan	Dwi fungsi teritorial, dari Mabes hingga babinsa desa. Keterlibatan tentara dalam menangani "keamanan kedalam" yang sebenarnya menjadi tugas polisi.	Pengutan pendekatan keamanan untuk pendisiplinan masyarakat; kontrol dan kepatuhan ketimbang kesadaran.	Lemahnya polisi, terpeliharanya budaya kekerasan; ketergantungan masyarakat pada tentara, lemahnya sistim keamanan mandiri masyarakat.
Ekonomi	Premanisme seperti tentara beking, tentara jadi <i>pokrol</i> ataupun <i>dep kolektor</i> .	Pengrusakan aturan main dan tata krama sosial ekonomi pemeliharaan kejahatan dan kekerasan; pencarian sumber daya maretial tentara.	Ketergantungan masyarakat pada militer; kematian institusi keamanan masyarakat merajalela kejahatan dan kekerasan.

Sumber : *Proposal Kegiatan 2000 ; 10*

Penyebab terjadinya mata rantai militerisasi yang sudah mengakar di atas sebenarnya bersumber dari militer sendiri serta masyarakat dari dalam militer, penyebab militerisasi berawal dari doktrin dwifungsi TNI, tentara yang tidak profesional, ketidak jelasan antara fungsi militer dan fungsi non militer dan klaim militer yang mempunyai tugas suci sebagai pengawal negara-bangsa. Dari sisi masyarakat, penyebab yang menyolok adalah penerimaan masyarakat atas militerisasi sebagai sebuah norma dan tradisi yang wajar, penghargaan yang berlebihan dari masyarakat terhadap tentara, serta miskinnya pemahaman

masyarakat terhadap fungsi militer dan non militer maupun dampak buruk dari militerisasi (Proceeding Program Maret – Agustus 2000 ; 9).

Kedua hal tersebut jika digabungkan maka penyebab mengakarnya militerisasi adalah miskinnya pemahaman dan kesadaran di kalangan militer (sebagai individu) maupun masyarakat terhadap dua hal : *Pertama*, perbedaan fungsi militer dan non militer dan *kedua*, dampak buruk serius yang menimbulkan dari militerisasi. Oleh karena itu pada masa transisi demokrasi sekarang ini perlu terus membicarakan dan menolak secara bersama-sama mata rantai militerisme yang mengganggu proses demokratisasi yang sedang dicanangkan dalam masyarakat kita.

II.3. b Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan mata rantai militerisasi yang tertulis diatas, maka kegiatan yang mengambil tema “ Penguatan Wacana Demiliterisasi dalam Masyarakat lokal “ mempunyai tujuan besar serta jangka penjang yang telah dirancang sebagai berikut: Membangun wacana penguatan wacana demiliterisasi dalam masyarakat lokal sebagai pendorong bagi reorientasi peran militer dalam bidang keamanan, politik, ekonomi, sebagai titik awal reorientasi hubungan sipil dan militer yang demokratis. (**Proposal Kegiatan ; 14**)

Dari Tujuan besar ini kegiatan ini akan menjadi titik awal untuk mencapai beberapa sasaran :

1. Masyarakat lokal melakukan penolakan terhadap militerisasi
2. Pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan non militer.

3. Masyarakat Sipil di tingkat lokal mampu mengembangkan relasi sosial - politik tanpa dipotong oleh demiliterisasi. (**Proposal Kegiatan ; 13**).

Dan untuk tujuan spesifiknya adalah membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat atas beberapa hal :

1. Perbedaan fungsi militer dan non militer.
2. Dampak buruk militerisasi bagi kehidupan sosial dan politik.

Berangkat dari tujuan spesifik diatas kegiatan ini dirancang untuk sampai kepada beberapa sasaran :

1. Kelompok sasaran semakain paham akan perbedaan fungsi militer dan non militer.
2. Kelompok sasaran makin paham akan dampak buruk militerisasi.
3. Kelompok sasaran mulai bicara dan menolak militerisasi seperti publik tingkat nasional menolak Dwifungsi. (**Proposal Kegiatan ; 14**).

II.3.c Kelompok Sasaran

Mengingat akan segala keterbatasan¹⁰ kegiatan ini hanya mengarap sebagian kecil dari Masyarakat Indonesia yang untuk kepentingan kegiatan ini di sebut sebagai kelompok sasaran. Sebagai kelompok sasaran yang telah dipilih oleh IRE adalah elemen-elemen masyarakat lokal di tingkat bawah berdasarkan “fungsi, peran, dan posisi sosialnya sebagai “agen“ yang mempunyai kapasitas (potensi maupun aktual) memformulasi, memproduksi, maupun memproduksi opini publik,

¹⁰ “ Keterbatasan kegiatan ini lebih banyak disebabkan karena adanya keterbatasan seperti masalah Dana, waktu serta tenaga oleh karena itu IRE lebih banyak memilih Komunitas Masyarakat yang kecil “. Pernyataan ini terungkap dalam wawancara dengan Bambang Hidayana Direktur IRE.

sekaligus sebagai akses media melangsukan fungsi tersebut. (Sutoro Eko (ed) 2000 ; 7).

Kelompok sasaran dipilih berdasarkan jaringan kerja yang selama ini sudah terbentuk dan berfungsi, dengan perluasan variasi partisipan berdasarkan pertimbangan kemajemukan latar belakang afiliasi politik, potensi peran sosial, akses media publik, pengelompokan sosial, pluralisme etnis, agama dan gender. Kelompok-kelompok tersebut antara lain Perangkat Desa, Polsek, Koramil, Babinsa, LKMD, LMD, RT, RW, Dasawisma, PKK, Pengurus Partai, Satgas Partai, Satgas Ormas, AMPI, KUD, Pengusaha lokal, PNS, dan sebagainya. Akan tetapi kelompok sasaran ini pada saat kegiatan dialog di bagi menjadi beberapa kelompok isu-isu yang terkait dengan militerisasi, yakni :

1. *Isu Keamanan*, dengan kelompok sasaran Perangkat Desa, Polsek, Koramil, Babinsa, LKMD, LMD, RT, RW, dan Satgas.
2. *Isu Politik / pemerintaban* dengan kelompok sasaran Perangkat Desa, Polsek, Koramil, Babinsa, LKMD, LMD, RT, RW, dan PNS.
3. *Isu Ekonomi* dengan kelompok ekonomi sasaran Perangkat Desa, Polsek, Babinsan, dan para Pengusaha di desa. (**Proposal Kegiatan ; 16**).

Menurut Arie Sujito,

IRE memilih kelompok-kelompok ini dengan alasan bahwa kelompok-kelompok yang ambil bagian dalam kegiatan ini mempunyai komunitas sosial agar supaya wacana yang didapat dalam kegiatan minimal akan di sebarkan kedalam kelompok tersebut. (Wawancara; Desember 2001)

II. 3 d Rangkaian Kegiatan

Kegiatan Penguatan Wacana Demiliterisasi dalam Masyarakat lokal ini dirancang selama 12 bulan (52 Minggu), yang dirinci menjadi dua serial, masing-masing serial membutuhkan waktu 6 bulan (26 Minggu). Dua rangkaian kegiatan yang terselenggara dalam waktu 12 bulan tersebut adalah :

a. Need Assessment

Kegiatan Need Assessment (NA) merupakan sebuah kegiatan “ *penelitian kecil* ” yang sebenarnya dimaksud untuk menghindari bias pandangan intelektual dalam merumuskan isu-isu dan praktek militerisasi. Selain itu **Bambang Yudhayana**¹¹ Mengatakan bahwa :

Need Assessment merupakan Penilaian mengenai kebutuhan masyarakat, yang mana penilaian itu lahir dari adanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian mereka di ajak kumpul untuk membicarakan serta memecahkan masalah mereka tersebut (Wawancara; 4 Januari 2001).

Ajakan memilih Need Assessesment menurut Sutoro Eko

Untuk mencapai tujuan kegiatan yang baik dan berkelanjutan kita harus berangkat dari dari persoalan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat, jadi kita membawa pemikiran-pemikiran kita seperti kita melakukan penelitian jadi kita berangkat dari masyarakat” (Wawancara 18 maret 2001).

Need Assessesment yang dilakukan untuk kegiatan Penguatan Wacana Demiliterisasi dalam Wacana Lokal mempunyai beberapa tujuan seperti :

1. Melacak wacana dan praktik-praktik ketidakjelasan pembagian fungsi militer dan non militer. Dengan cara ini diharapkan isu-isu dan praktik-praktik militerisasi digali dari bawah yang lebih membumi, bukan ditentukan dari kacamata intelektual.

¹¹ Pernyataan ini keluar dalam wawancara dengan Beliau pada tanggal 4 Januari 2001

2. Melacak aktor-aktor yang mereproduksi wacana dan praktik-praktik militerisasi yang mentadisi di masyarakat.
3. Mengidentifikasi para pembentuk opini publik yang dinilai strategis dalam upaya pendidikan politik dan penyediaan wacana alternatif untuk keperluan akasi penolakan militerisasi. (**Proposal Kegiatan ; 16**).

Beberapa tujuan di atas diharapkan bisa mencapai aput nyata, yakni tersedia data base informasi tentang praktek-praktek dan dampak buruk militerisasi dan premanisasi militer, yang bisa diakses publik maupun sebagai input untuk menajamkan analisis dan merancang berbagai kegaitan dialog dan publikasi berikutnya. (**Proceeding Program 2000 ; 12**). Dan untuk mencapai tujuan diatas ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Pengumpulan data*, lewat penyebaran angket yang dilakukan di tiga desa yaitu Tambakromo, Ponjong, Gunung Kidul, Desa Jaten, Temon, Kulon Progo, serta desa Wukirsari. Disamping itu juga dilakukan metode wawancara dengan sejumlah informan yang relevan untuk dapat memperdalam hasil-hasil yang dipeoleh dari penyebaran angket.
2. *Pengelolaan atau analisis atas data* yang terkumpul lewat wawancara.
3. *Diskusi pakar* yang membicarakan yang mebicarakan temuan-temuan dari *Need Assessment* dan sekaligus merumuskan isu-isu menarik sebagai bekal bagi kegiatan dialog berikutnya.
4. Sebelum kegiatan dialog dilakukan *Traning for fasilitator* bagi staf IRE untuk mempekaya metode fasilitasi, sehingga dialog menjadi lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan ini. (**Proceeding Program 2000 ; 11-12**).

Tabel 6
Rincian Kegiatan Need Assessment

Tema	Militerisasi dalam Masyarakat Lokal
Tujuan	1. Melacak wacana dan praktik-praktik militerisasi dalam masyarakat lokal. 2. Melacak aktor-aktor yang terlibat dalam praktik-praktik militerisasi. 3. Menidentifikasi para pembentuk opini publik di desa yang dinilai strategis dalam upaya pendidikan politik dan penyediaan wacana alternatif untuk penolakan terhadap militerisasi.
Output Nyata	Tersediannya data base informasi tentang praktik-praktek dan dampak buruk militerisasi yang bisa diakses publik maupun sebagai input untuk mempertajam analisis dan merancang rangkaian kegiatan dialog dan publikasi.
Rangkaian kegiatan	Wawancara, analisis, diskusi dan training.
Lokasi kegiatan	6 desa sasaran (3 desa untuk seri I dan 3 desa untuk seri II)
Frekuensi	2 kali dengan desa sasaran yang berbeda. Dilakukan 1,5 bulan diawal serial kegiatan

Sumber : Proposal Kegiatan ; 17

Need Assessment akan dilakukan 2 kali dalam tempo 12 bulan, yaitu 1 kali diawal serial pertama dan 1 kali di awal kegiatan serial kedua. Masing-masing Need Assessment membutuhkan sekitar 1,5 bulan atau 6 minggu, yang terdiri dari penyusunan rancangan 1 minggu, terjun ke lapangan 1 minggu analisis data 1 minggu serta diskusi 1 minggu dan pelatihan fasilitator 1 minggu. Need Assessment pada serial pertama akan mencakup tiga desa (Wukisari, Tambakromo, dan Janten) dan Need Assessment kedua mencakup tiga desa (Balong, Kebonrejo, Madurejo). Khusus untuk kegiatan terjun ke lapangan, akan melibatkan 1 koordinator, 6 koordinator desa dan 12 peneliti yang terbagi menjadi 4 orang per desa sasaran. (**Proposal Kegiatan ; 17**).

b. Rangkaian Dialog

Dialog ini merupakan kegiatan inti sebagai kelanjutan Need Assessment. Informasi yang di peroleh dari Need Assessment akan dipertajam dan dialogkan dengan kelompok sasaran. Secara keseluruhan dialog akan digelar 18 kali putaran selama 12 bulan (52 minggu). Sejumlah 18 kali putaran di bagi menjadi 9 seri kegiatan dialog di 3 desa pada serial I (6 bulan atau 26 bulan), 9 seri dialog berikutnya di 3 desa pada serial II (6 bulan). Setiap minggu akan di gelar tiga kali dilaog di tiga desa (6 Bulan). Setiap 6 minggu akan di gelar tiga kali dialog yang membicarakan 3 wilayah militerisasi (memasyarakatkan, politik dan ekonomi) setiap dialog membutuhkan 6 jam , yang melibatkan 50 orang peserta yang beragam, dengan dibantu oleh seorang nara sumber dan seorang fasilitator.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan dialog ini :

1. Membicarakan temuan-temuan Need Assessment sehingga bisa mempertajam masalah-maslah militerisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.
2. Sebagai media pendidikan politik yang membangkitkan pemahaman dan kesadaran para peserta terhadap perbedaan fungsi militer dan fungsi non militer serta praktik-praktik dan dampak buruk militerisasi dalam kehidupan sosial politik sehari-hari di tingkat bawah.
3. Sebagai media bersama untuk merumuskan pembagian kerja yang jelas antara fungsi militer dan non militer serta merumuskan tindakan yang memranggi praktik-praktik militerisasi dalam kehidupan sosial politik di tingkat lokal.

Tabel 7
Rincian Kegiatan Dialog

Bentuk	Dialog Antar Elemen Masyarakat Minus Tentara dan Polisi
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membicarakan temuan-temuan <i>Need Assessment</i> sehingga bisa mempertajam masalah-masalah hubungan sipil-militer dalam kehidupan sehari. 2. Memberikan pendidikan politik yang membangkitkan pemahaman kesadaran para peserta terhadap perbedaan fungsi militer dan non militer serta praktik-praktik dan dampak buruk militerisasi dalam kehidupan sehari-hari ditingkat bawah. 3. sebagai media bersama untuk merumuskan tindakan yang memerangi atau bahkan menolak praktik-praktik militerisasi dalam kehidupan sosial politik di tingkat lokal.
Ouput Nyata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dialog faham dan sadar akan pembagian fungsi militer dan non militer serta praktik-praktik dan dampak buruk militerisasi. 2. Para peserta mulai dengan membicarakan hasil-hasil dialog di lingkungan keluarga, teman, tetangga dan rapat desa berikutnya 3. dalam jangka panjang masyarakat lokal akan memperlihatkan sikap yang menolak praktik-praktik militerisasi. 4. masyarakat desa mampu menata kehidupan sosial politik, mengelola konflik dan sistem keamanan mandiri yang bebas dari militerisasi.
Peserta	50 orang yang beragam sesuai dengan tema (Isu yang diangkat)
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah dengan forum tanya jawab 2. Diskusi kelompok 3. Dialog intensif
Frekuensi	18 kali (12 bulan) di bagi 2 serial. Setiap serial 9 kali pertemuan dialog di 3 desa. Setiap dialog butuh waktu sekitar 6 jam.
Tempat	6 desa sasaran : 3 desa pada serial I dan 3 desa serial II

Sumber : Proposal Kegiatan ; 18

Dengan tiga tujuan, maka beberapa sasaran nyata yang hendak dicapai setelah selesai kegiatan dialog :

1. Kelompok sasaran atau peserta dialog menjadi terbuka pemahaman dan kesadarannya akan pembagian kerja akan fungsi militer dan nonmiliter (sipil) serta praktik-praktik dan dampak buruk militerisasi dalam kehidupan sehari-hari mereka.
2. Para peserta melakukan tindakan baik secara individual maupun bersama-sama dalam menyikapi militerisasi, meskipun tindakan itu baru dimulai dengan membicarakan hasil-hasil dialog di lingkungan keluarga, teman, tetangga dan rapat desa berikutnya.
3. Dengan langkah awal penyebaran wacana itu, dalam jangka panjang masyarakat lokal akan memperlihatkan sikapnya yang menolak praktik-praktik

militerisasi, sebagai tradisi yang tidak sehat bagi upaya membangun demokrasi dan masyarakat sipil.

4. Dengan berakhirnya kegiatan ini juga diharapkan bahwa elemen-elemen masyarakat sipil di tingkat desa mampu menata kehidupan sosial politik, mengelola konflik dan sistem keamanan mandiri yang bebas dari militerisasi.

Rangkaian dialog yang diselenggarakan tersebut meliputi tiga isu berbeda dalam konteks hubungan sipil-militer yang masing-masing isu melibatkan kelompok sasaran yang relatif berbeda. Ketiga isu besar tersebut adalah : kemasyarakatan, politik/pemerintahan serta isu ekonomi. Isu kemasyarakatan adalah wadah besar, yang didalamnya menyangkut masalah keamanan, pelayanan sosial, kejahatan, kerukunan antar umat beragama, kenakalan, dan sebagainya.

Isu Politik/ Pemerintahan merupakan isu yang berkaitan dengan kinerja kerja dari pemerintah desa di hadapan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa, peran aparat keamanan dalam bidang politik (pemerintahan), pemilihan umum, pemilihan kepala desa beserta perangkat dibawahnya, artikulasi kepentingan, hubungan partai dengan pemerintah desa dan diatasnya, hubungan partai dengan masyarakat, kepercayaan masyarakat dengan partai politik, konflik antar kelompok atau warga dalam masyarakat dan sebagainya.

Sendangkan untuk isu ekonomi mencakup persoalan keuangan desa, tanah bengkok, pemilihan tanah, sertifikasi tanah, perkreditan, sistem ijon, KUD, perdagangan dan sebagainya. Untuk mencapai hasil yang optimal, dialog memanfaatkan metode gabungan antara prespektif (transfer) pengetahuan dan elisitif (membangkitkan pemahaman peserta). Gabungan ini dimaksud untuk membandingkan dan memadukan pengalaman empirik yang disampaikan oleh

para peserta dengan pandangan konseptual dan intelektual dari nara sumber. Tetapi metode ensitif akan memberikan bobot yang besar ketimbang metode prespektif yang bertujuan untuk menghindari bias pandangan intelektual yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan empirik, serta untuk memperdalam pemahaman lokal.

Dialog yang diselenggarakan di tiga desa sasaran yang mana setiap desa sasaran di bagi dalam tiga dusun. Setiap desa kegiatan dialog di bagi dalam tiga tahap. Dialog tahap pertama bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan persoalan-persoalan militerisasi. Dialog tahap kedua merupakan kelanjutan dari dialog lanjutan dari dialog tahap pertama yang bertujuan untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi dari dialog yang pertama. Dialog tahap pertama dan tahap kedua dilaksanakan di tingkat dusun masing-masing desa sasaran. Dialog tahap terakhir yakni tahap ketiga di sebut dengan dialog tingkat desa, karena pada tahap ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertemukan peserta dialog dari masing-masing dusun. Di samping itu dialog tahap ketiga ini juga dimasukkan untuk mendiskusikan hasil dialog di tingkat dusun dengan pemerintah dan instansi terkait.

c. Publikasi

Dalam kegiatan sebelumnya Need Assessment dan dialog akan dilanjutkan dengan kegiatan publikasi dalam bentuk proceeding assement dan dialog yang bisa dikembalikan pada setiap desa sasaran. Rangkaian kegiatan publikasi ini meliputi 4 kali terbit dalam 12 bulan dan *webside*. Tiga bentuk publikasi tersebut dimasud untuk tujuan desiminasi informasi tentang pembagian fungsi militer dan non militer, praktik-praktik dan dampak buruk militerisasi khususnya dalam masyarakat lokal level bawah. Publikasi ini juag hendak dijadikan sebagai wahana aksi informasi untuk memperkaya wacana-wacana alternatif dalam konteks penguatan demokrasi dan masyarakat sipil, yang bebas dari militerisasi.

Tabel 8
Rangkaian Kegiatan Publikasi

Bentuk	Publikasi Proceeding dan Bletin
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi informasi tentang fungsi militer dan non militer serta praktik-praktik dan dampak buruk militerisasi, khususnya dalam masyarakat lokal di level bawah. 2. Sebagai wahana aksi informasi untuk memperkaya wacana-wacana alternatif dalam konteks penguatan demokrasi masyarakat sipil yang bebas dari militerisasi.
Ouput Nyata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi dan referensi yang membahas seputar isu-isu militerisasi, militerisasi dan premanisme. 2. Tersosialisasikan gagasan dan tindakan pengurangan militerisasi di tingkat lokal kepada kelompok sasaran dan masyarakat, sehingga menjadi isu nasional.
Frekuensi	4 kali buletin
Volume	20 eksemplar setiap proceeding dan 500 eksemplar tiap bulan

Sumber : Proposal Kegiatan ; 22

III. KESIMPULAN

Berawal dari komunitas atau kelompok diskusi yang terdiri dari beberapa intelektual muda dan terbentuk pada tahun 1994, IRE atau *Institute For Research and Empowerment* yang mencoba konsent pada masalah-masalah sosial – politik yang terjadi di masyarakat. Dari diskusi rutin yang dikembangkan IRE mencoba untuk merealisasikannya dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaannya kepada masyarakat lokal. Fokus kegiatan yang ingin dikembangkan oleh IRE adalah pengembangan dan penguatan gagasan maupun sikap kritis demi pemberdayaan masyarakat dan promosi demokrasi. Dengan menggunakan transformasi nilai-nilai demokratisasi dan tetap menjunjung tinggi metode dialog, IRE mempunyai visi agar terciptanya masyarakat emansipatoris dan merdeka, dari segala bentuk diskriminasi dan represif guna meningkatkan daya kritis yang dimiliki oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang menjadi pusat perhatian dari IRE meliputi : Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, Publikasi dan Advokasi. Tentunya untuk mengembangkan program-program utama tersebut IRE mempunyai kelompok-kelompok sasaran yang menjadi mitranya (baca; masyarakat) dalam melakukan transformasi nilai-nilai demokratisasi. Kelompok-kelompok tersebut merupakan komunitas masyarakat yang selalu dirugikan oleh proses politisasi yang terjadi dalam negara. Selain itu juga kelompok-kelompok seperti element-element yang saling berinteraksi antara Negara, Masyarakat sipil, Masyarakat Politik, serta Masyarakat Ekonomi.

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh IRE diantaranya adalah program “Penguatan Wacana Demiliterisasi dalam Masyarakat Lokal” program ini pada intinya merupakan sebuah pengembangan wacana demiliterisasi dalam masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat desa dan kecamatan sebagai pendorong bagi reorientasi peran dalam bidang militer, politik, ekonomi sebagai titik awal reorientasi hubungan sipil dan militer yang demokratis. Dari tujuan ini diharapkan dapat membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat atas fungsi militer dan non militer serta dampak buruk militerisasi bagi kehidupan sosial dan politik.

Bagi IRE selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru masyarakat kita telah terhegemoni oleh kekuatan negara yang otoriter. Hal yang nyata dapat dilihat dari peran militer yang telah memasuki wilayah-wilayah sipil. Contoh yang jelas dapat dilihat dari peran-peran strategis dalam pemerintahan yang sentralistik mulai dari pusat hingga ke pemerintahan paling rendah yaitu desa masih dikuasai oleh militer, selain peran pemerintahan militer juga ada dalam bidang ekonomi yang mana pihak militer hadir sebagai beking dari pihak pengusaha dalam menjakan bisnis mereka, selain itu juga masyarakat masih mengandalkan militer dalam menyelesaikan segala konflik yang terjadi dimasyarakat.

Realitas-realitas semacam ini yang sudah barang tentu akan menghambat jalanya proses demokratisasi di negara kita. Maka IRE sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat lewat program “ Penguatan wacana Demiliterisasi dalam Masyarakat Lokal “ mencoba memberikan wacana serta pemahaman mengenai

hubungan antara sipil dan militer kepada masyarakat yang selama ini menghambat jalannya proses demokratisasi.

Realitas yang tertera seperti diatas merupakan sebuah hasil dari proses yang dilakukan oleh IRE dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi Need Assessment, dialog, serta publikasi. Need assessment merupakan sebuah penelitian kecil untuk memetakan permasalahan militerisasi yang terjadi di masyarakat, kemudian setelah itu dari hasil pemetaan tersebut diadakan dialog dengan pihak-pihak yang terkait dalam komunitas masyarakat guna mencari jalan keluar serta pemecahan dari masalah tersebut selain itu juga untuk mendengar secara langsung bagaimana praktek-praktek militerisme terjadi pada masyarakat. Setelah itu dari hasil-hasil dan temuan-temuan tersebut kemudian dilakukan sosialisasi lewat media penerbitan seperti buku dan buletin.